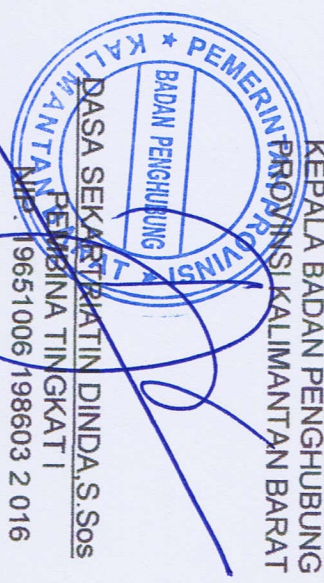


**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**BADAN PENGHUBUNG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SUB BAGIAN TATA USAHA**

- Dasar Hukum
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) kepada

Nomor Operasional	Prosedur	800/ 14. 028 / Banhub.A
Tanggal Pembuatan		1 Januari 2018
Tanggal Revisi		1 Mei 2021
Tanggal Efektif		1 Mei 2021
Disahkan Oleh		KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  
DASA SEKARTAPATIN DINDA, S. Sos  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19651006 198603 2 016

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP / TAPKIN )

Nama SOP	Kualitas pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal berpendidikan SMA</li><li>2. Menguasai dan memahami Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat</li><li>3. Menguasai dan memahami Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat</li><li>4. Mengetahui dan memahami hasil pelaksanaan kegiatan SKPD</li></ol>



<p>Pemerintah,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Kepala Daerah kepada DPRD;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</li> <li>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>11. Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;</li> <li>12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2013;</li> <li>13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat</li> </ol>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Rencana Strategis</li> </ol>	<p>ATK, Komputer, Kalkulator, DPA, Penetapan Kinerja, Laporan Bulanan, Laporan Akhir Kegiatan</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Kualitas penyusunan LAKIP SKPD akan berpengaruh terhadap penyusunan LAKIP Provinsi</p>	



